

## PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KINERJA PADA LEMBAGA PEMERINTAH

<sup>1</sup>**Daniel Lukito**

<sup>1</sup>Fakultas Digital Business, Univrsitas Bina Nusantara  
Email: <sup>1</sup>daniel.lukito@binus.ac.id

<sup>2</sup>**Amiruddin Qadaar**

<sup>2</sup>Fakultas Manajemen, STIE Tri Dharma Widya  
Email: <sup>1</sup>amiruddinqadaar@gmail.com

<sup>3</sup>**Budi Mardikawati**

<sup>3</sup>Manajemen transportasi Jalan, Politeknik Transfortasi Darat Bali  
Email: <sup>1</sup>mardikawati@poltradabali.ac.id

<sup>4</sup>**Melly Susanti**

<sup>4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu  
Email: <sup>1</sup>maksi07.unib@gmail.com

Korespondensi author: daniel.lukito@binus.ac.id

=====  
**Abstract :** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara penganggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah. Akuntabilitas kinerja pemerintah diukur dengan indikator kelancaran program, pelaksanaan anggaran, indikator kinerja, analisis keuangan, pelaporan evaluasi, dan durasi program. Penganggaran berbasis kinerja menggunakan ukuran akuntabilitas dan transparansi, keadilan anggaran, efisiensi, dan efektivitas sebagai variabel independen. Keputusan dibuat oleh individu yang mempunyai kekuasaan demi kepentingan terbaik. Penelitian ini melibatkan 39 pegawai departemen, sekretaris, kepala bagian, kepala subbagian, dan subunit kerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu yang membantu penyusunan anggaran pemerintah. Data dikumpulkan melalui metode kuesioner, dan responden diberikan satu. Untuk menganalisis data digunakan uji Spearman Rank dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen-penerapan anggaran berbasis kinerja dengan metrik akuntabilitas dan transparansi anggaran, disiplin anggaran, kewajaran anggaran, efisiensi anggaran, dan efektivitas anggaran-berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah.

**Kata Kunci:** Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Perencanaan Anggaran, Implementasi Anggaran.

**Abstract :** *The aim of this research is to investigate the relationship between performance-based budgeting and performance accountability of government institutions. Government performance accountability is measured by indicators of program smoothness, budget implementation, performance indicators, financial analysis, evaluation reporting, and program duration. Performance-based budgeting uses measures of accountability and transparency, budget fairness, efficiency, and effectiveness as independent variables. Decisions are made by individuals who have power in the best interests. This research involved 39 department employees, secretaries, section heads, sub-division heads, and work subunits from the Regional Work Unit (SKPD) of the Environment and Forestry Service of Bengkulu Province who helped prepare the government budget. Data was collected through a questionnaire method, and respondents were given one. To analyze the data, the Spearman Rank test and hypothesis testing were used. The results of this research show that the three independent variables-implementation of performance-based budgeting with metrics of budget accountability and transparency, budget discipline, budget fairness, budget efficiency, and budget effectiveness-influence the performance accountability of government institutions.*

**Keywords:** *Performance-Based Budget Implementation, Budget Planning, Budget Implementation.*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Keuangan Negara menyoroti perubahan dalam tata kelola keuangan negara, menekankan efisiensi dan efektivitas, serta mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Paradigma penganggaran berbasis kinerja yang diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 menandai era baru

peran anggaran dalam kemajuan negara. Menurut Ramadhana et al., (2023) dan Tarigan et al., (2023) meskipun sejumlah kebijakan penganggaran berbasis kinerja dianggap lebih unggul dibandingkan teknik penganggaran sebelumnya, pengembangan berkelanjutan tetap diperlukan untuk meningkatkan implementasi penganggaran berbasis kinerja karena, untuk mencapai kesempurnaan dan perumusan anggaran berbasis kinerja semaksimal mungkin, keadaan dan tuntutan harus selalu berubah (Ramadhana et al., 2023).

Di Indonesia, proses perencanaan dan penganggaran belum terintegrasi secara langsung dengan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (PBK) (Suliantoro, 2023; Kustiwi & Ratnawati, 2023). Integrasi proses penganggaran berbasis kinerja diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara pemenuhan harapan masyarakat dan tujuan pemerintah. Pendekatan Kementerian Agama Kabupaten Serang dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja akan lebih berhasil dan mampu mengatasi tantangan dan kekurangan yang ada saat ini (Syihabudin et al., 2023). Penganggaran sebagai alat kontrol, insentif, dan persuasi satuan kerja untuk bertindak efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi merupakan salah satu variabel yang harus diperhatikan dalam pendidikan tinggi (Alimuddin et al., 2022). Situmorang & Martani, (2023) menyatakan bahwa penganggaran berbasis kinerja telah digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan temuan penilaian kinerja anggaran yang menyangkut implementasi, manfaat, dan konteks. Peningkatan kompetensi dan kerjasama SDM harus dilakukan secara konsisten karena pelaksanaannya tidak ideal ketika ada perubahan personel, peraturan perundang-undangan, atau penerapan.

Akuntabilitas anggaran dan kinerja penyerapan anggaran yang lebih baik didorong oleh penganggaran berbasis kinerja akan membantu pada instansi pemerintah merencanakan perubahan dan menetapkan agenda (Biswan & Grafitanti, 2021); (Nasution et al., 2023). Guna mengidentifikasi tantangan dan tujuan strategis pembangunan kesehatan sejalan dengan perencanaan dan penganggaran pusat-daerah yang berbasis kinerja, Kementerian Kesehatan berdedikasi penuh dalam menyelenggarakan dan memetakan seluruh hasil tujuan Musrenbangda bidang kesehatan (Wibowo, 2023). Efektivitas pengendalian anggaran pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pemantauan fungsional preventif dan penganggaran berbasis kinerja pada saat yang bersamaan (M. D. Sari, 2022). Kinerja pegawai pada BLUD RSUD Palabuhanratu dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh penganggaran berbasis kinerja (Haq, 2022). Penganggaran berbasis kinerja mendapat manfaat dari akuntabilitas dan keterbukaan (Fransisca, Saiful, 2018).

Menurut Zaghena et al., (2022) dan Wardani & Silvia (2021) jika proses penilaian kinerja sudah dilaksanakan dengan memperhatikan indikator yang ada, maka pelaksanaannya akan berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti. Kejelasan sasaran anggaran dan Anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan (Handayani et al., 2022; Rochman, 2021; Suhendar et al., 2021). Demikian juga dengan Nusa & Mutmainnah (2022) bahwa perencanaan dan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung. Penganggaran berbasis kinerja terbukti secara signifikan meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat (Sari & Noviyana, 2022). Pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja berpengaruh positif sedangkan perencanaan anggaran dan pertanggung

jawaban anggaran berpengaruh negative terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Attamimi & Lestari, 2023). Anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan keuangan dan pengendalian akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BPMP Provinsi Papua (Saptarinur, 2022).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan hipotesis empiris bahwa penganggaran didasarkan pada kinerja dan tanggung jawab instansi pemerintah Provinsi Bengkulu yang relevan. Akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerja merupakan variabel terikat, sementara penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan variabel independen. Sedangkan kebaruan dari penelitian ini akuntabilitas penggunaan anggaran di tingkat Pemerintah ditinjau dari teori keagenan, teori implementasi kebijakan dan teori konjensi.

## **KAJIAN LITERATUR**

### ***Agency Theory***

Pengaturan hukum, juga dikenal sebagai keagenan hubungan, terjadi ketika satu pihak (prinsipal) menugaskan pihak lain (agen) untuk mengajukan tuntutan atas nama prinsipal dan memberikan pihak lain cara untuk mendapatkan informasi untuk membuat keputusan. pilihan yang didasarkan pada kepentingan terbaik kepala sekolah (Zogning, 2022). Ketika aktivitas seseorang mempengaruhi orang lain, terdapat hubungan prinsipal-agen, atau keagenan (Gwala & Mashau, 2023). Perjanjian tertulis atau implisit dibuat antara agen dan prinsipal dengan harapan agen akan melakukan hal-hal atau melakukan tugas atas permintaan prinsipal. Gagasan kontrak dan standar perilaku adalah salah satu dari banyak tingkat perjanjian yang dibuat oleh sistem kelembagaan. Salah satu hasil dari situasi pengetahuan yang tidak seimbang atau asimetris antara prinsipal dan agen adalah bahwa agen memiliki kemampuan yang lebih besar daripada prinsipal untuk mempelajari lebih lanjut tentang bisnisnya. Akibatnya, agen lebih cenderung menyembunyikan hal-hal yang tidak disadari oleh prinsipal, dengan asumsi bahwa orang-orang bertindak demi kepentingan terbaik mereka. Dari perspektif pemerintah, masalah keagenan berasal dari kecenderungan eksekutif untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri, dimulai dengan penganggaran dan pengambilan keputusan, dan diakhiri dengan penyediaan laporan keuangan yang adil untuk menunjukkan pencapaian mereka saat ini dan memungkinkan mereka untuk mempertahankan pekerjaan mereka. Peraturan-peraturan dan pendapat masyarakat (Oktariani, 2017). Teori keagenan dapat digunakan untuk menjelaskan konsep akuntabilitas. Akuntabilitas secara garis besar mengacu pada tanggung jawab pemberi amanah, yang mencakup penyediaan, pelaporan, dan pengungkapan kepada pihak pemberi amanah atas semua tindakan dan tanggung jawabnya. Kepala sekolah, atau Dewan Perwakilan Sekolah, memiliki otoritas dan berhak untuk bertanggung jawab. Menurut (Beal Partyka, 2022), variabel akuntabilitas kinerja dalam penelitian ini didukung oleh gagasan teori keagenan.

### **Teori Implementasi Kebijakan**

Menurut (Ananda Naufal Zaki et al., 2023) keagenan dapat digunakan untuk menjelaskan konsep akuntabilitas. Akuntabilitas secara garis besar mengacu pada tanggung jawab pemberi amanah, yang mencakup penyediaan, pelaporan, dan pengungkapan kepada pihak pemberi amanah atas semua tindakan dan tanggung jawabnya. Kepala sekolah, atau Dewan Perwakilan Sekolah, memiliki otoritas dan berhak untuk bertanggung jawab (Xu & Gao, 2017). Jauh lebih sulit untuk mengungkapkannya dalam kata-kata dan slogan yang dapat diterima oleh para pemimpin dan pemilih yang mungkin mendengarnya. Menurut (Mubarok et al., 2020) proses mengimplementasikan



keputusan kebijakan utama. Hal ini biasanya berbentuk undang-undang, tetapi bisa juga melalui perintah eksekutif yang signifikan, keputusan pengadilan, atau cara lain. Dalam kebanyakan kasus, keputusan tersebut mencakup penjelasan tentang masalah yang harus diselesaikan, penjelasan tentang tujuan atau alasan yang harus dicapai, dan sejumlah opsi untuk mengatur atau menyusun proses pelaksanaan.

### **Teori Kontinjensi**

Menurut (Shala et al., 2021) Teori Kontingensi merupakan lingkungan organisasi di mana sistem pengendalian akan diterapkan mempengaruhi bagaimana sistem tersebut dirancang. Kesesuaian antara struktur organisasi suatu organisasi dengan lingkungan operasinya menentukan seberapa efektif organisasi tersebut. Penelitian (Viviane, 2019); (Harney, 2023) menunjukkan bahwa peningkatan kesesuaian antara sistem pengendalian dan variabel kontingensi akan menghasilkan kinerja organisasi yang lebih baik. Menurut teori kontingensi, kesesuaian antara komponen kontekstual (kontinjensi) dan sistem akuntansi manajemen interoperabilitas (misalnya, sistem akuntansi kinerja dan manajemen) menentukan seberapa baik manajemen dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam kasus ini, sistem penganggaran akan memungkinkan peningkatan kinerja di sektor publik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu rumusan masalah tentang adanya variabel dividen, baik pada satu variabel maupun beberapa variabel (Rojo-ramos et al., 2022). Para ilmuwan meneliti populasi, yaitu sekelompok besar benda atau orang dengan karakteristik tertentu, untuk menarik kesimpulan. Studi ini melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. Pemilihan sampel purposive digunakan karena hanya anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dapat dipilih untuk menjawab. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu adalah satu-satunya sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Sistem akuntansi manajemen Interoperabilitas aspek kontekstual seperti sistem akuntansi kinerja dan manajemen, khususnya sistem penganggaran yang akan meningkatkan kinerja sektor publik. Ukuran dan susunan populasi sedikit banyak tercermin dalam sampel. Jika karena alasan apa pun ukuran sampel terlalu besar bagi peneliti untuk meneliti populasi secara keseluruhan, mereka masih dapat menggunakan sampel dari populasi (seperti kurangnya sumber daya, waktu, atau personel) (Sugiyono, 2011). Pekerja dari Bengkulu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi menjadi sampel penelitian. Kepala departemen, sekretaris, tiga kepala subbagian, empat kepala bagian, dan tiga puluh sub unit kerja diantaranya.

### **Metode Pengumpulan Data**

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari responden tanpa menggunakan perantara; dalam kasus ini, ini adalah tanggapan atas pertanyaan kuesioner. Sumber data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah skor atau nilai jawaban responden terhadap pertanyaan kuesioner. Penelitian ini mengumpulkan data utama dari tanggapan para partisipan terhadap variabel penelitian yang diteliti. Kuesioner dapat dikirimkan sebagai bagian dari strategi pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini melibatkan responden untuk menjawab serangkaian pertanyaan atau pertanyaan tertulis. Kepala Dinas, sekretaris, kepala seksi, kepala subbagian, dan subunit kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu menjadi sumber data primer bagi peneliti dalam hal ini. Pada pertanyaan tertutup, peserta hanya dapat memilih satu ( $\surd$ ) dari daftar kemungkinan jawaban. Variabel terikat dalam penelitian ini, yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan akuntabilitas anggaran, serta variabel bebas,

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dinilai dengan skala Likert yang berkisar antara 1 hingga 5.

**Motode Analisis Data**

a. Uji Rank Spearman

Jika setiap variabel yang dihubungkan adalah unik, korelasi peringkat Spearman dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan atau mengevaluasi pentingnya hipotesis. Menurut Sugiyono (2013), Rumus Korelasi Rank Spearman ( $\rho = \text{rho}$ ) adalah sebagai berikut:

$$\rho = 1 - \frac{6\sum b_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

P adalah singkatan dari koefisien korelasi peringkat Spearman, n untuk jumlah sampel, dan  $\sum b_i^2$  untuk selisih total peringkat variabel X dan variabel Y. Koresponden dapat menggunakan pedoman berikut untuk membantu dan menentukan apakah koefisien korelasi yang diamati besar atau kecil:

**Tabel 1. Pedoman Interpretasi Korelasi/Hubungan**

| No | Interval      | Korelasi/Hubungan |
|----|---------------|-------------------|
| 1. | 0,000- 0,199  | Sangat rendah     |
| 2. | 0,200 - 0,399 | Rendah            |
| 3. | 0,400 - 0,599 | Sedang            |
| 4. | 0,600 - 0,799 | Kuat              |
| 5. | 0,800 - 1,000 | Sangat Kuat       |

Uji Hipotesis

Uji t digunakan dalam pengujian hipotesis untuk menentukan signifikan atau tidaknya hasil komputasi dan untuk menunjukkan keakuratannya:

1) Uji t

$$2) t_{hitung} = \frac{r_{xy} \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_{xy}^2}}$$

Keterangan:

- t hitung = tes hitung
- r = koefesien kolerasi
- r<sup>2</sup> = koefesien kolerasi determinasi
- n = jumlah sampel

3) Teori statistik yang diterapkan

Ho1: Terdapat korelasi yang kuat antara akuntabilitas kinerja dan penerapan penganggaran berbasis kinerja di organisasi pemerintah.

Ha1: Tidak ada korelasi yang signifikan secara statistik antara akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah dan penerapan penganggaran berbasis kinerja.

4) Menentukan *level of signifkacant* sebesar 5% atau = 0,05 dk = 39 – 3 = 36 dengan kritiria pengujian sebagai berikut:

Ho diterima jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  artinya tidak terdapat hubungan positif.

$H_a$  diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  artinya terdapat hubungan positif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Dengan menggunakan korelasi peringkat Spearman, penerapan anggaran berbasis kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu terbukti berhubungan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dengan asumsi analisis dilakukan untuk mencari hubungan atau menguji hipotesis asosiatif yang signifikan jika setiap variabel terhubung secara ordinal dan sumber datanya tidak harus sama, maka analisis rank Spearman merupakan metode yang digunakan untuk memastikan hubungan asosiatif antara variabel-variabel tersebut. variabel pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (X) dan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Data rasio yang digunakan untuk korelasi peringkat spearman harus diubah terlebih dahulu menjadi data ordinal berupa peringkat yang berasal dari skor jawaban responden. Variabel pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (X) dan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dikorelasikan dengan menggunakan metode perankingan spearman seperti berikut ini. Keterangan : nilai  $n = 39$  dan  $bi^2 = 149$ .

Selanjutnya digunakan rumus berikut untuk mendapatkan nilai korelasi rank spearman variabel X dan Y:

$$\rho = 1 - \frac{6\sum b_i^2}{n(n^2-1)}$$

$$\rho = 1 - \frac{6\sum 149}{39(39^2 - 1)}$$

$$\rho = 1 - \frac{894}{59280}$$

$$\rho = 1 - 0,015$$

$$\rho = 0,98$$

Berdasarkan nilai korelasi rank Spearman, nilai rho yang dihitung berada antara 0,800 dan 1,000, dengan nilai 0,98. Hal ini menunjukkan tingginya korelasi yang terjalin antara penganggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja.

### Pengujian Hipotesis

Nilai taksiran rho dibandingkan dengan rhotabel untuk melihat apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Kemudian, kriteria pengujian hipotesis ditinjau dalam keadaan berikut:

1. Menentukan nilai  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$
2.  $rH_0$  ditolak dan  $rH_a$  diterima ; jika nilai  $H_{Ohitung} > H_{Otabel}$
3.  $rH_0$  diterima dan  $rH_a$  ditolak ; jika nilai  $H_{Ohitung} < H_{Otabel}$
4. Penentuan level of signifikan 95% atau alfa ( $\alpha$ ) 5%

Hubungan antar variabel diuji dengan menggunakan analisis korelasi rank spearman ( $\rho$ ). Hubungan tersebut kemudian diuji dengan menggunakan uji t untuk mengetahui hipotesis yang benar. Berikut rincian hipotesis hubungan antara anggaran berdasarkan pekerjaan (X) dengan akses terhadap pekerjaan pemerintah (Y) pada Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu.

$$t_{hitung} = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

diketahui

$r$  = Nilai Korelasi Rank Spearman ( $\rho$ ) yang telah dianalisa adalah 0,98  
 $t_{\text{tabel}}$  = 1,687 (terlampir)

Dari nilai tersebut dapat dihitung uji hipotesisnya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 t_{\text{hitung}} &= r \sqrt{\frac{39-2}{1-r^2}} \\
 &= 0,98 \sqrt{\frac{37}{1-(0,4)^2}} \\
 &= 0,98 \sqrt{\frac{37}{0,84}} \\
 &= 0,98 \sqrt{44,0476} \\
 &= 6,504
 \end{aligned}$$

### Pembahasan

Dari hasil perhitungan uji t menghasilkan thitung 6,504 dan t tabel 1,687. Hal ini menunjukkan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  disetujui karena  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  ( $6,504 > 1,687$ ). Hal ini menunjukkan terdapat hubungan antara penganggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas. Studi menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dengan penggunaan anggaran berbasis kinerja (Parwoto, 2020); (Suwanda et al., 2021). Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dengan penerapan anggaran berbasis kinerja mempunyai korelasi yang signifikan, berdasarkan temuan uji hipotesis rho. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja harus diterapkan agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dapat berfungsi lebih bertanggung jawab.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu telah menerapkan penganggaran berbasis kerja (kinerja based budgeting) dengan tujuan transparansi dan akuntabilitas anggaran. Untuk itu digunakan dokumen rencana pembangunan yang memuat visi, misi, dan program kerja daerah. Laporan keuangan SKPD yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan yang meliputi neraca, rencana anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. Perencanaan anggaran kas dan dokumentasi pelaksanaan anggaran merupakan contoh disiplin anggaran (Innovate, 2015); (Sekar Mayangsari, 2021). Kepercayaan pada proses dan keadilan hasil, bukan pada prosedur atau hasil, merupakan prasyarat keadilan anggaran di kalangan anggota organisasi. Pagu Anggaran Sementara (PPAS) rioritas ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. Dalam hal pengelolaan keuangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu telah melakukan perbandingan antara realisasi pendapatan dengan kenyataan pengeluaran, dengan pengeluaran yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran hidup yang diperbolehkan. Anggaran dibuat dengan menggunakan metode kinerja berdasarkan tingkat kinerja tugas yang diinginkan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu meminta pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerjanya, memastikan bahwa program dilaksanakan dengan lancar dan bahwa kegiatan dan program diutamakan daripada penggunaan sumber keuangan yang tersedia secara efektif. Penetapan hubungan kinerja yang jelas antara tujuan program atau kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan dan metrik kinerja. Tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dengan menggunakan data internal



dan eksternal beserta indikator kinerjanya (Kien et al., 2018). Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu telah mengeluarkan laporan selesainya kegiatan dan mempublikasikannya kepada masyarakat dengan tetap mengacu pada standar tertentu yang berlaku dalam penilaian pelaporan dan siaran program. Program pelaporan dan penilaian memberi bobot lebih pada kegiatan dibandingkan dengan keuntungan atau hasil akhir yang diperoleh masyarakat.

## KESIMPULAN

Hubungan antara penganggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu diwakili oleh nilai  $r_{Ho}(\rho)$  hitung sekitar 0,98 yang terletak pada interval 0,600 hingga 0,799 yang menunjukkan bahwa kinerja- penganggaran berbasis relatif tinggi. Keterkaitan penerapan anggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinilai dengan nilai  $t$  hitung sebesar 6,504 dan 1,687. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas aparatur pemerintah dalam bekerja di Perumahan dan Lingkungan Perkotaan Kabupaten Bengkulu sangat dipengaruhi oleh anggaran berdasarkan pengalaman kerja. Angka ini juga lebih tinggi dari tabel ( $6,504 > 1,687$ ).

## DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, F. H., Haliah, & Kusumawati, A. (2022). Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Perguruan Tinggi Di Indonesia. In *Isafir: Islamic Accounting And Finance Review* (Vol. 3, Issue 2, Pp. 272–280). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <https://doi.org/10.24252/isafir.v3i2.34071>
- Ananda Naufal Zaki, Melati Oktafiyanni, & Lenni Yovita. (2023). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Perspektif Teori Keagenan. *Jekobs*, 2(1), 23-37. <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jekobs>
- Attamimi, D. F., & Lestari, Y. O. (2023). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Seluruh Opd Kabupaten Pamekasan. *Akuisisi : Jurnal Akuntansi*, 19(01), 118–130.
- Beal Partyka, R. (2022). Supply Chain Management: An Integrative Review From The Agency Theory Perspective. *Revista De Gestao*, 29(2), 175–198. <https://doi.org/10.1108/rege-04-2021-0058>
- Biswan, A. T., & Grafitanti, I. D. (2021). Memaknai Kembali Penganggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Studi Implementasi Penganggaran Sektor Publik. *Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan*, 2(1), 35–56.
- Fransisca, Saiful, N. A. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Fairness Volume*, 8, 171–182.
- Gwala, R. S., & Mashau, P. (2023). Tracing The Evolution Of Agency Theory In Corporate Governance. *Governance As A Catalyst For Public Sector Sustainability*, April, 260–285. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-6966-8.ch013>
- Handayani, F., Hartati, S., & Armaini, R. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pertanian Tph. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 4(8.5.2017), 2003–2005.
- Haq, A. (2022). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Blud Rsud Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. *Mimbar Administrasi*



*Mandiri*, 18(2), 87–112.

- Harney, B. (2023). Contingency Theory. *Encyclopedia Of Human Resource Management, Second Edition, May 2016*, 60–61. <https://doi.org/10.4337/9781800378841.c.19>
- Innovate, G. (2015). 1budget And Financial Planing. *Global Innovate Leadership Module*, 40. [www.eleaderstochange.com](http://www.eleaderstochange.com)
- Kien, C., Grillich, L., Nussbaumer-Streit, B., & Schoberberger, R. (2018). Pathways Leading To Success And Non-Success: A Process Evaluation Of A Cluster Randomized Physical Activity Health Promotion Program Applying Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis. *Bmc Public Health*, 18(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-6284-x>
- Kustiwi, I. A., & Ratnawati, T. (2023). Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Desa Cupak Kabupaten Jombang. In *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (Semnastekmu)* (Vol. 3, Issue 1, Pp. 41–52). Universitas Sains Dan Teknologi Komputer. <https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v3i1.202>
- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration Of George Edward Iii, Marilee S Grindle, And Mazmanian And Sabatier Theories In The Policy Analysis Triangle Framework. *Journal Of Public Administration Studies*, 005(01), 33–38. <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>
- Nasution, A. P., Pristiyo, P., & Melia, Yona. (2023). Total Quality Management As A Business Investment In Facing Business Competition Asean Countries Areas. *Amca Journal Of Community Development*, 3(2), 42–48. <https://doi.org/10.51773/ajcd.v3i2.227>
- Nusa, I. B. S., & Mutmainnah, U. G. (2022). Pengaruh Perencanaan Dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Survei Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Bandung). In *Journal Of Economics, Management, Business And Accounting* (Vol. 2, Issue 2, Pp. 172–191). Universitas Komputer Indonesia. <https://doi.org/10.34010/jemba.v2i2.8539>
- Parwoto, P. (2020). *The Relationship Between Performance Based Budgeting Implementation , Budget Absorption , Accountability And Local Government Performance. October*, 13–14.
- Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Lpmp) Provinsi Lampung. (2021). In *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya* (Vol. 6, Issue 1). Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. <https://doi.org/10.35968/jbau.v6i1.625>
- Ramadhana, A. M. N., Ummam, N., Qodarina, N., Istika, P., & Siregar, R. (2023). Kendala Dan Kelemahan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Sektor Publik : Suatu Tinjauan. *Journal Of Law, Administration, And Social Science*, 3(1), 63–71.
- Rochman, F. (2021). Analisis Sistem Manajemen Pekerjaan Berbasis Web Untuk Menunjang Akuntabilitas Kinerja Di BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. In *Jiko (Jurnal Informatika Dan Komputer)* (Vol. 4, Issue 3, Pp. 180–186). Lppm Universitas Khairun. <https://doi.org/10.33387/jiko.v4i3.3414>
- Rojo-Ramos, J., Extremadura, U. De, Martín-Carmona, R., Deporte, C., Extremadura, U. De, Vega-Muñoz, A., Manzano-Redondo, F., Rojo-Ramos, J., Vega-Muñoz, A.,

- & Manzano-Redondo, F. (2022). Análisis Descriptivo De Los Turistas Deportivos En España Descriptive Analysis Of Sports Tourists In Spain Revista De Educación , Motricidad E Investigación. *E-Motion*, 18(2022), 86–99.
- Saptarinur, R. (2022). Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan Keuangan Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 2, 1–23.
- Sari, M. D. (2022). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja , Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 1(1), 78–92.
- Sari, S., & Noviyana, N. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat. In *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah* (Vol. 12, Issue 2). Universitas Muhammadiyah Aceh. <https://doi.org/10.37598/jam.v12i2.1611>
- Sekar Mayangsari, A. B. (2021). The Role Of Cash Planning In Budget Absorption: Perception Testing. *Jurnal Akuntansi*, 25(2), 201. <https://doi.org/10.24912/ja.v25i2.806>
- Shala, B., Prebreza, A., & Ramosaj, B. (2021). The Contingency Theory Of Management As A Factor Of Acknowledging The Leaders-Managers Of Our Time Study Case: The Practice Of The Contingency Theory In The Company Avrios. *Oalib*, 08(09), 1–20. <https://doi.org/10.4236/oalib.1107850>
- Situmorang, G. M., & Martani, D. (2023). Evaluasi Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja Di Masa Pandemi Covid-19. In *Owner* (Vol. 7, Issue 4, Pp. 2941–2948). Politeknik Ganesha. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1694>
- Suhendar, S., Sari, M. S., & Nofitri, R. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” (Studi Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan). In *Journal Of Accounting Taxing And Auditing (Jata)* (Vol. 2, Issue 1). Universitas Mitra Indonesia. <https://doi.org/10.57084/jata.v2i1.585>
- Suliantoro, I. (2023). Penganggaran Berbasis Kinerja: Antara Indonesia Dan Korea Selatan. In *Jurnal Manajemen Keuangan Publik* (Vol. 7, Issue 1, Pp. 26–42). Politeknik Keuangan Negara Stan. <https://doi.org/10.31092/Jmkp.V7i1.2153>
- Suwanda, D., Moenek, R., Lukman, S., & Syaifullah, M. (2021). The Implementation Of Performance-Based Budgeting Through A Money Follow Program In Impressing Budget Corruption. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(2), 871. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1576>
- Syihabudin, T., Ma'mur, I., & Shobri. (2023). Analisis Strategi Penguatan Penganggaran Berbasis Kinerja Di Kementerian Agama Kabupaten Serang. *Jurnal Sosio Dialektika*, 8(1), 25–41.
- Tarigan, W. J., Sinaga, M. H., & Ginting, R. S. (2023). Berbasis Kinerja Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 9–20.
- Viviane, S. (2019). Contingency Theories Of Leadership. *Encyclopedia Of Group Processes And Intergroup Relations*, 1–5.
- Wibowo, D. (2023). Tantangan Implementasi Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Berdasarkan Perencanaan Dan Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Pendekatan Transformasi Sistem Kesehatan. In *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia* (Vol. 22, Issue 2, Pp. 82–

- 88). Institute Of Research And Community Services Diponegoro University (Lppm Undip). <https://doi.org/10.14710/mkmi.22.2.82-88>
- Xu, Q., & Gao, L. (2017). *The Causes Analysis Of Public Policy Implementation Deviation: Based On A Framework Of Paul A. Sabatier And Daniel A. Mazmanian*. 157(Iceiss), 298–303. <https://doi.org/10.2991/iceiss-17.2017.71>
- Zaghena, P., Mamentu, M., Mingkid, E., Pascasarjana, M., Studi, P., Sumberdaya, P., Ratulangi, U. S., & Korupsi, B. (2022). Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Lakip ) Kabupaten Minahasa Selatan The Performance Of The Tourism Office In Preparing The Government Agency Performance Accountability Report ( Gapar ) Of South . *Agri-Sosioekonomi Unsrat*, 18(September), 927–938.
- Zogning, F. (2022). Agency Theory : A Critical Review Agency Theory : A Critical Review. *Management Journal*, 9(October), 1–8.